

Transformasi Administrasi Publik Lokal Berbasis Kebijaksanaan Lokal Dalam Mendukung Sdgs Melalui Pelayanan Digitalisasi di Kantor Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah

*M. Nasuhi¹, Mufidah², Lale Yaquturnafis³, Sofian Hadi⁴

Universitas Nahdatul Wathan Mataram, Indonesia

uheyfree@gmail.com, d0826098302@unwmataram.ac.id,
sofianhadi301@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi administrasi publik berbasis digital merupakan agenda kunci untuk mencapai pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan di tingkat daerah. Namun, implementasi digitalisasi pelayanan di Kantor Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah masih menghadapi berbagai kendala, termasuk literasi digital masyarakat, kesiapan apparatur, dan infrastruktur teknologi yang tidak merata. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas digitalisasi pelayanan publik dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya, mengidentifikasi integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam praktik administrasi digital, menilai tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat, serta merumuskan strategi transformasi yang relevan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang melibatkan pejabat Kantor Perdagangan, pelaku usaha, dan pengguna jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi meningkatkan efisiensi dan transparansi, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan resistensi masyarakat terhadap layanan daring. Temuan penting lainnya adalah integrasi nilai-nilai kearifan lokal yang suboptimal, yang memiliki potensi signifikan untuk memperkuat partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Studi ini menyimpulkan bahwa transformasi administrasi publik di Lombok Tengah membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat teknologi tetapi juga kontekstual, dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem digital. Model transformasi ini dapat menjadi strategi inovatif untuk memperkuat layanan publik yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian SDGs di tingkat lokal.

Kata kunci: **Digitalisasi Layanan Publik, Transformasi Administrasi, Literasi Digital, Kearifan Lokal, Partisipasi Masyarakat**

ABSTRACT

Digital-based public administration transformation is a key agenda for achieving effective, efficient, and transparent services at the regional level. However, the implementation of service digitalization at the Central Lombok Regency Trade Office still faces various obstacles, including public digital literacy, apparatus readiness, and uneven technological infrastructure. This study aims to analyze the effectiveness of public service digitalization by considering the socio-cultural context, identifying the integration of local wisdom values

into digital administration practices, assessing the level of public participation and trust, and formulating relevant transformation strategies to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). This study uses a qualitative approach with data collection techniques such as in-depth interviews, observation, and documentation, involving Trade Office officials, business actors, and service users. The results show that although digitalization improves efficiency and transparency, its implementation is not fully optimal due to digital literacy gaps, limited infrastructure, and public resistance to online services. Another important finding is the suboptimal integration of local wisdom values, which have significant potential to strengthen public participation and trust. This study concludes that public administration transformation in Central Lombok requires an approach that is not only technological but also contextual, integrating local wisdom into digital systems. This transformation model can be an innovative strategy to strengthen inclusive, responsive, and sustainable public services, while supporting the achievement of the SDGs at the local level.

Keywords: *Digitalization Of Public Services, Administrative Transformation, Digital Literacy, Local Wisdom, Community Participation*

PENDAHULUAN

Transformasi administrasi publik merupakan kebutuhan mendesak untuk mengatasi dinamika tata kelola modern. Tuntutan global akan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel menempatkan digitalisasi layanan sebagai instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik (Gede Agung dkk. 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang dianut dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 16, yang berfokus pada lembaga yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan.

Namun, digitalisasi layanan publik tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budaya masyarakat setempat (Reed dkk. 2018). Kearifan lokal merupakan faktor strategis yang mampu memperkuat penerimaan dan keberlanjutan inovasi digital di dalam masyarakat. Lombok Tengah, sebagai daerah yang kaya akan tradisi, norma, dan nilai-nilai budaya, membutuhkan pendekatan administrasi publik yang menekankan tidak hanya aspek teknologi tetapi juga integrasi kearifan lokal (Thimm 2022). Hal ini sangat penting agar layanan publik tidak hanya modern dan cepat, tetapi juga manusiawi, inklusif, dan selaras dengan karakteristik masyarakat.

Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur, membina, dan mengawasi kegiatan perdagangan, menghadapi tantangan dalam memberikan layanan yang efektif kepada masyarakat dan pelaku usaha (Serpa dan Ferreira 2019). Di satu sisi, percepatan digitalisasi menuntut peningkatan kualitas layanan, transparansi, dan pengurangan birokrasi (Li dkk. 2023). Di sisi lain, hambatan tetap ada, termasuk rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan penolakan dari

beberapa masyarakat terhadap sistem layanan daring yang dianggap rumit atau tidak sesuai dengan pola interaksi sosial yang berlaku (Lammers dan Garcia 2017).

TINJAUAN TEORI

Situasi ini menuntut strategi transformasi administrasi publik yang berbasis pada kearifan lokal, mengintegrasikan nilai-nilai seperti musyawarah, kerja sama timbal balik, kepercayaan, dan hubungan sosial-komunal dalam masyarakat Lombok ke dalam sistem layanan digital (Mora dkk. 2023). Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperluas akses publik terhadap layanan perdagangan, dan sekaligus mendorong pencapaian target SDG, khususnya dalam hal pembangunan ekonomi inklusif (SDG 8) (Haleem dkk. 2022), mengurangi ketidaksetaraan (SDG 10) (Shi dkk. 2019), dan memperkuat institusi (SDG 16) (Rian 2001).

Penelitian ini relevan dan signifikan karena tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik tetapi juga memberikan landasan konseptual dan praktis bagi pemerintah daerah dalam menerapkan digitalisasi yang kontekstual, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pembangunan global (Malodia dkk. 2021).

Fokus penelitian ini adalah terbatasnya efektivitas digitalisasi layanan publik di Kantor Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, yang masih menjadi tantangan utama, khususnya terkait dengan rendahnya literasi digital masyarakat, kesiapan aparatur, dan infrastruktur teknologi yang tidak merata (Gopalakrishnan dan Damanpour 1994). Lebih lanjut, kurangnya integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam praktik administrasi publik berbasis digital telah mengakibatkan sistem pelayanan yang cenderung berorientasi teknis dan tidak sepenuhnya selaras dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Lombok Tengah. Situasi ini mengakibatkan rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital, karena sistem berbasis online dianggap lebih kompleks, kurang familiar, dan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan nyata bisnis lokal (Saha 2021). Selain itu, terdapat tantangan dalam menghubungkan digitalisasi pelayanan dengan pencapaian SDGs, khususnya dalam hal pembangunan ekonomi inklusif, pengurangan kesenjangan, dan penguatan institusi berkelanjutan (Kraus dkk. 2021).

Konsep Delayering atau Perataan Organisasi

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas digitalisasi pelayanan publik di Kantor Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, dengan mempertimbangkan tantangan terkait literasi digital masyarakat, kesiapan aparat,

dan ketersediaan infrastruktur teknologi; untuk mengidentifikasi dan menguji integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam praktik administrasi publik berbasis digital agar lebih selaras dengan karakteristik sosial budaya masyarakat; untuk menilai tingkat partisipasi publik dan kepercayaan pada layanan digital, beserta faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan penolakan publik terhadap layanan daring; dan untuk menganalisis dampak layanan digital terhadap efektivitas layanan digital. dan merumuskan strategi transformasi administrasi publik berdasarkan kearifan lokal melalui digitalisasi layanan yang dapat mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam hal pembangunan ekonomi inklusif, mengurangi ketidaksetaraan, dan memperkuat institusi (Hadjerrouit 2010).

Keadaan digitalisasi layanan publik saat ini di Pusat Kantor Perdagangan Lombok Tengah dalam penelitian ini. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah saat ini sedang mempromosikan transformasi digital layanan publik melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Lebih lanjut, tantangan seperti rendahnya pemahaman tentang perlindungan data pribadi dan etika media digital menimbulkan hambatan signifikan terhadap keamanan dan kepercayaan publik pada platform digital. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya untuk memperluas akses ke layanan digital dan meningkatkan literasi teknologi, berbagai hambatan praktis seperti kesiapan peralatan, infrastruktur yang tidak merata, rendahnya pemanfaatan sistem informasi desa, dan rendahnya literasi seringkali menghambat efektivitas digitalisasi layanan publik (Hanisch dkk. 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena isu yang diteliti berkaitan dengan fenomena sosial dan budaya serta dinamika kelembagaan yang membutuhkan pemahaman mendalam, bukan sekadar pengukuran numerik. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan pengalaman berbagai aktor dalam proses digitalisasi layanan publik berdasarkan kearifan lokal. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, penelitian ini menggunakan studi kasus Kantor Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah. Studi kasus ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam tentang implementasi transformasi administrasi publik melalui digitalisasi layanan dalam konteks lokal tertentu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan model Miles dan Huberman.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah, dengan fokus pada Kantor Perdagangan sebagai lokasi utama, mengingat instansi ini berfungsi sebagai pusat layanan publik di sektor perdagangan dan saat ini sedang melakukan transformasi administrasi melalui digitalisasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara mendalam dengan pejabat Kantor Perdagangan, pelaku bisnis, dan pengguna layanan digital di masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi pemerintah daerah, laporan kegiatan, arsip kebijakan, dan publikasi terkait digitalisasi layanan publik dan kearifan lokal di Lombok Tengah. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pejabat Kantor Perdagangan dan pengguna layanan publik di masyarakat yang terkait dengan sistem digitalisasi. Karena sifat kualitatif penelitian ini, sampel ditentukan menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan, dengan memilih informan yang dianggap memiliki pemahaman terbaik tentang isu-isu transformasi layanan, baik dari perspektif penyedia layanan (pejabat) maupun penerima layanan (aktor masyarakat dan bisnis). Metode ini memastikan data yang lebih mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi aktor kunci mengenai efektivitas digitalisasi dan integrasi nilai-nilai kearifan lokal, sementara observasi digunakan untuk mengamati langsung proses layanan di Kantor Perdagangan, baik secara manual maupun digital. Dokumentasi dilakukan dengan meninjau arsip, kebijakan, dan data statistik yang relevan. Semua data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode, untuk memastikan hasil analisis yang lebih kredibel dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya digitalisasi pelayanan publik di Kantor Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan melalui penggunaan aplikasi online dan integrasi layanan di dalam Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Dari perspektif teori administrasi publik modern dan paradigma Tata Kelola Era Digital (DEG), digitalisasi seharusnya mempercepat pelayanan, mengurangi birokrasi manual, dan meningkatkan transparansi. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan kendala seperti rendahnya literasi digital masyarakat, kesiapan

pegawai negeri yang tidak merata, dan infrastruktur jaringan yang terbatas di daerah pedesaan. Hal ini telah menghambat digitalisasi untuk sepenuhnya mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas yang diuraikan dalam teori administrasi publik modern.

Dari perspektif teori tata kelola pemerintahan yang baik, digitalisasi pelayanan diharapkan dapat mendorong prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian warga negara memandang pelayanan digital sebagai peningkatan transparansi karena proses dapat dipantau secara online dan mengurangi birokrasi yang rumit praktik-praktik teknis. Namun, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital masih rendah, terutama karena minimnya jangkauan, terbatasnya akses, dan persepsi bahwa sistem digital lebih kompleks. Situasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi hanya sebagian memenuhi aspek tata kelola yang baik (transparansi), tetapi masih lemah dalam aspek partisipasi dan inklusivitas.

Analisis berdasarkan teori kearifan lokal menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai budaya Lombok Tengah, seperti musyawarah, kerja sama timbal balik, dan kepercayaan, belum optimal dalam sistem digital. Layanan daring cenderung berorientasi pada prosedur teknis tanpa memasukkan nilai-nilai sosial yang dapat meningkatkan penerimaan masyarakat. Misalnya, masyarakat lebih nyaman dengan interaksi tatap muka karena mereka menganggapnya sebagai bentuk penghormatan dan sarana membangun kepercayaan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang menggabungkan sistem digital dengan prinsip-prinsip kearifan lokal untuk membuat layanan lebih manusiawi dan kontekstual.

Dari perspektif teori adopsi inovasi Everett Rogers, rendahnya penerimaan publik terhadap layanan digital dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk persepsi bahwa sistem daring terlalu kompleks (kompleksitas), tidak sesuai dengan pola interaksi sosial (kompatibilitas), dan terbatasnya peluang untuk mencoba (kemampuan untuk mencoba). Sebaliknya, keunggulan relatif digitalisasi, seperti kecepatan layanan, belum dirasakan secara optimal karena seringnya hambatan teknis. Hal ini menjelaskan lambatnya adopsi inovasi digital, terutama di kalangan usaha kecil dan masyarakat pedesaan.

Terakhir, ketika dianalisis menggunakan teori pembangunan berkelanjutan, transformasi administrasi publik berbasis digital harus berkontribusi pada pencapaian SDGs, khususnya SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), SDG 10 (pengurangan ketidaksetaraan), dan SDG 16 (lembaga yang tangguh). Temuan penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan telah membuka peluang baru bagi bisnis untuk mengakses layanan lebih cepat dan efisien, tetapi

kesenjangan tetap terlihat antara mereka yang melek digital dan mereka yang tidak. Dengan demikian, digitalisasi memang berpotensi mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi tanpa strategi yang berbasis pada kearifan lokal dan peningkatan literasi digital, keberlanjutannya akan sulit dicapai.

Melalui kegiatan penelitian ini, peneliti menyajikan ringkasan hasil wawancara dan temuan awal yang relevan terlihat dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1

"Layanan online ini bagus untuk transparansi, tetapi perlu lebih banyak publisitas agar masyarakat di desa memahami cara menggunakannya." (Wawancara dengan seorang tokoh masyarakat di Lombok Tengah, 19 September 2025).

Menurut seorang tokoh masyarakat di Lombok Tengah, keberadaan layanan online berdampak positif dari segi transparansi, tetapi belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat desa. Hal ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi publik yang lebih intensif dan terarah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital.



Gambar 2

"Kami telah mencoba mengikuti pelatihan digital yang diberikan pemerintah, tetapi beberapa aplikasi masih terasa rumit untuk dipahami." (Wawancara dengan seorang pedagang pasar tradisional di Praya, 18 September 2025).

Pernyataan para pedagang pasar tradisional tersebut menggambarkan bahwa meskipun ada pelatihan pemerintah, tingkat literasi digital masih belum merata. Beberapa aplikasi dianggap terlalu kompleks, membutuhkan dukungan berkelanjutan dan penyederhanaan fitur aplikasi agar lebih mudah digunakan.



Gambar 3

"Kami melihat digitalisasi sebagai langkah strategis, tetapi tantangannya terletak pada kesiapan sumber daya manusia. Tidak semua karyawan familiar dengan teknologi, sehingga pelatihan berkelanjutan diperlukan. Di sisi lain, transformasi pelayanan publik berbasis digital sangat penting, tetapi kita juga harus memastikan bahwa nilai-nilai lokal tetap hadir, misalnya, melalui bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dan pelayanan yang ramah. Dari perspektif kebijakan, digitalisasi di kantor kami juga mendukung efisiensi dan transparansi, tetapi kami juga menyadari bahwa infrastruktur teknologi di daerah pedesaan masih perlu diperkuat." (Wawancara dengan Kepala Bidang Industri, Kantor Perdagangan Lombok Tengah, 20 September 2025).

Wawancara dengan Kepala Bidang Industri menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik dipandang sebagai strategi penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, beberapa tantangan utama masih ada, termasuk keterbatasan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang tidak merata, dan partisipasi masyarakat yang kurang

optimal. Kepala Bidang Industri juga menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem pelayanan, sehingga masyarakat merasa lebih dekat dan tidak terasingkan oleh inovasi digital yang diterapkan. Hal ini menunjukkan kesadaran pemerintah bahwa transformasi administrasi publik tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga harus kontekstual dan inklusif, dengan menggabungkan teknologi dan budaya lokal sebagai satu kesatuan.

SIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa transformasi administrasi publik berbasis digital di Kantor Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah belum sepenuhnya optimal karena kendala seperti literasi digital, kesiapan staf, dan infrastruktur yang terbatas. Namun, terdapat peluang signifikan jika digitalisasi layanan diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal, karena hal ini dapat memperkuat kepemilikan publik terhadap sistem yang ada, sekaligus menumbuhkan kepercayaan dan meningkatkan partisipasi. Oleh karena itu, temuan baru dari studi ini adalah pentingnya model transformasi digital yang menekankan tidak hanya aspek teknologi tetapi juga menggabungkan aspek budaya lokal sebagai strategi untuk penyampaian layanan publik yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan agar Kantor Perdagangan Lombok Tengah memperkuat literasi digital publik melalui program pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada kebutuhan bisnis lokal. Pejabat pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas mereka melalui pendidikan dan pelatihan digital yang intensif, sehingga mereka dapat menjadi fasilitator yang mampu menjembatani kesenjangan antara teknologi dan masyarakat. Lebih lanjut, pengembangan infrastruktur teknologi harus didistribusikan secara merata di seluruh daerah pedesaan untuk menghindari kesenjangan layanan. Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem digital, seperti penggunaan bahasa daerah atau pola komunikasi yang sesuai dengan budaya Lombok, juga sangat penting untuk layanan digital yang lebih inklusif dan manusiawi. Dengan langkah-langkah ini, transformasi administrasi publik berbasis digital dapat dilakukan secara efektif sekaligus mendukung pencapaian SDGs secara nyata di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Gede Agung, Dewa Agung, Ahmad Munjin Nasih, Sumarmi, Idris, dan Bayu Kurniawan. 2024. "Kearifan Lokal sebagai Model Komunikasi Antar Agama dalam Menciptakan Harmoni Beragama di Indonesia." Ilmu Sosial dan Humaniora Terbuka 9(Juli 2023):100827. doi:10.1016/j.ssaho.2024.100827.
- Gopalakrishnan, Shanthi, dan Fariborz Damanpour. 1994. "Pola Generasi dan Adopsi Inovasi dalam Organisasi: Model Kontingensi Atribut

- Inovasi." Jurnal Manajemen Teknik dan Teknologi 11(2):95–116. doi:10.1016/0923-4748(94)90001-9.
- Hadjerrouit, Said. 2010. "Kerangka Teoretis untuk Mendorong Literasi Digital: Studi Kasus Sumber Daya Pembelajaran Digital." IFIP Advances in Information and Communication Technology 324:144–54. doi:10.1007/978-3-642-15378-5_14.
- Haleem, Abid, Mohd Javaid, Mohd Asim Qadri, dan Rajiv Suman. 2022. "Memahami Peran Teknologi Digital dalam Pendidikan: Sebuah Tinjauan." Sustainable Operations and Computers 3(Mei):275–85. doi:10.1016/j.susoc.2022.05.004.
- Hanisch, Marvin, Curtis M. Goldsby, Nicolai E. Fabian, dan Jana Oehmichen. 2023. "Tata Kelola Digital: Kerangka Konseptual dan Agenda Penelitian." Jurnal Riset Bisnis 162(Juli 2022):113777. doi:10.1016/j.jbusres.2023.113777.
- Kraus, Sascha, Paul Jones, Norbert Kailer, Alexandra Weinmann, Nuria Chaparro-Banegas, dan Norat Roig-Tierno. 2021. "Transformasi Digital: Tinjauan Umum Keadaan Terkini Penelitian." SAGE Open 11(3):1–15. doi:10.1177/21582440211047576.
- Lammers, John C., dan Mattea A. Garcia. 2017. "Pendekatan Teori Institusional." Ensiklopedia Internasional Komunikasi Organisasi (Maret):1–10. doi:10.1002/9781118955567.wbieoc113. Li, Shuangyu, Katherine Miles, Riya E. George, Candan Ertubey, Peter Pype, dan Jia Liu. 2023. "Tinjauan Kritis Kerangka Kerja dan Model Kompetensi Budaya dalam Pendidikan Kedokteran dan Profesi Kesehatan: Sintesis Meta-Etnografi: Panduan BEME No. 79." Medical Teacher 45(10):1085–1107. doi:10.1080/0142159X.2023.2174419.
- Malodia, Suresh, Amandeep Dhir, Mahima Mishra, dan Zeeshan Ahmed Bhatti. 2021. "Masa Depan E-Government: Kerangka Konseptual Terintegrasi." Technological Forecasting and Social Change 173(Juli):121102. doi:10.1016/j.techfore.2021.121102.
- Mora, Luca, Paolo Gerli, Lorenzo Ardito, dan Antonio Messeni Petruzzelli. 2023. "Tata Kelola Kota Pintar dari Perspektif Manajemen Inovasi: Kerangka Teoretis, Tinjauan Praktik Saat Ini, dan Agenda Penelitian

Masa Depan.” Technovation 123(Desember 2021):102717.
doi:10.1016/j.technovation.2023.102717.

Reed, Mark S., Steven Vella, Edward Challies, Joris de Vente, Lynne Frewer, Daniela Hohenwallner-Ries, Tobias Huber, Rosmarie K. Neumann, Elizabeth A. Oughton, Julian Sidoli del Ceno, dan Hedwig van Delden. 2018. “Teori Partisipasi: Apa yang Membuat Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Publik dalam Manajemen Lingkungan Berhasil?” Restoration Ecology 26:S7–17. doi:10.1111/rec.12541.

Rian, Erin. 2001. “Kepercayaan dan Ketidakpercayaan Publik: Implikasi Teoritis Doktrin Kepercayaan Publik untuk Sumber Daya Alam.” Sains dan Teknologi 31(477):1–14.

Saha, Satyajit. 2021. “Administrasi Publik Baru: Analisis Kritis.” ATHENA V(2):104–15.

Serpa, Sandro, dan Carlos Miguel Ferreira. 2019. “Konsep Birokrasi oleh Max Weber.” Jurnal Internasional Studi Ilmu Sosial 7(2):12. doi:10.11114/ijsss.v7i2.3979.

Shi, Longyu, Linwei Han, Fengmei Yang, dan Lijie Gao. 2019. “Evolusi Teori Pembangunan Berkelanjutan: Jenis, Tujuan, dan Prospek Penelitian.” Sustainability (Switzerland) 11(24):1–16. doi:10.3390/su11247158.

Thimm, Heiko. 2022. “Abstraksi Berbasis Teori Sistem dan Skema Pengambilan Keputusan untuk Manajemen Kepatuhan Lingkungan Perusahaan.” Operasi Berkelanjutan dan Komputer 3(Januari):188–202. doi:10.1016/j.susoc.2022.01.007.